



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKIRMAN**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **160293**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.820.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di KOTA MAKASSAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/80 m2 di POLEWALI MANDAR
, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Bangunan Seluas 18 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/140 m2 di POLEWALI
MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 187 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/45 m2 di POLEWALI MANDAR
, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 186.800.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
2. LAINNYA, HUSQVARNA TRAILL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. LAINNYA, POLYGON EXTRADA 6 Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA KERANJANG Tahun 2020, HASIL



SENDIRI Rp. 2.000.000

6. LAINNYA, SHIMIZU POMPA DORONG Tahun 2020, HASIL

SENDIRI Rp. 800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	213.670.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	167.965.498
F. HARTA LAINNYA	Rp.	80.000.000
Sub Total	Rp.	2.468.435.498
III. HUTANG	Rp.	55.634.915
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.412.800.583

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.